



Analisis Implementasi Program Keterampilan dan Kegiatan Kerja Bagi Narapidana Studi Kasus Lapas Kelas I Tangerang

Lollong Manting

¹ Universitas Pamulang
Dosen01943@unpam.ac.id¹

Keyword:

Correction, Treatment, Skill, Participation

Abstract

The purpose of this research is first, to analyze the implementation of the program of activities and work skills for inmates at Tangerang Correction centre, second to analyze the effectiveness of the implementation of the program of activities and work skills, as well as the purpose of correctional services, namely to form the prisoners to become fully human beings, realize their mistakes, improve themselves, not repeat criminal acts, can play a role in development, can live normally as good and responsible citizens so that they can be accepted again by the community. The research method used in this research is qualitative research, arguing that the qualitative approach is related to the concepts and problems raised leading to the fact that the implementation of work activities programs in prisons. The conclusions from this research are first, the implementation/implementation of job training activities in the correction centre has been conducted well, secondly, the involvement or participation of convicts in work activities can be said to be quite optimal, while the obstacles found are the obstacles to implementing work skills activities are lack of ability to conduct market research, especially in determining the product to be developed, limited space to carry out work activities due to the impact of overcrowding, production activities in correctional institutions depend on the head of correctional Institutions and workshop staff so that skills and work experience are not standardized, production supervision tends to consider aspects of activities not a business aspect such as the need for product quality control, and existing marketing is still conventionally limited to the area around prisons.

Pendahuluan

Untuk mencapai tujuan Pemasyarakatan, yaitu untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, dapat berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, maka setiap WBP akan menjalani pembinaan selama menjalani masa pidananya. Pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lapas/Rutan, pembinaan yang dimaksud adalah Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Pembinaan Kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak WBP agar menjadi manusia

seutuhnya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bertanggung jawab pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan Pembinaan Kemandirian dilaksanakan dengan maksud agar WBP memiliki bekal keterampilan yang cukup, sehingga setelah bebas diharapkan mampu bersaing dalam bursa tenaga kerja dan / atau dapat hidup mandiri sehingga dapat berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Pembinaan Kemandirian di dalam Lapas dilakukan dalam bentuk pemberian latihan keterampilan dan kegiatan kerja/produksi bagi narapidana. Pemberian latihan dan kegiatan kerja bagi narapidana ini, selain bertujuan membantu narapidana mengembangkan dirinya dan mempersiapkan dirinya untuk kembali ke masyarakat dengan memberi bekal keterampilan kepada mereka, juga merupakan terapi untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan menghindarkan diri mereka dari kegiatan-kegiatan yang tidak diinginkan. Kegiatan latihan keterampilan dan kegiatan kerja bagi narapidana merupakan kewajiban, sekaligus sebagai bagian dari proses pembinaan kemandirian yang diberikan kepada narapidana selama menjalani masa pidananya.. Kegiatan kerja juga merupakan bagian aktifitas narapidana untuk menambah pengetahuan dan keterampilan serta penghasilan. Jadi tujuan pembinaan kemandirian adalah memberikan nilai tambah kehidupan dan penghidupan WBP baik selama menjalani masa pidananya maupun setelah selesai menjalani masa pidananya.

Pembinaan kemandirian berupa latihan keterampilan dan kegiatan kerja/produksi bagi narapidana ini secara operasional dilaksanakan oleh suatu Bengkel Kerja (Bengker) berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PK.03.01 Tahun 1989 Tentang Tata Laksana Pengelolaan dan Pengadministrasian Kegiatan Bengkel Kerja.

Bengkel kerja ini diharapkan mampu mewujudkan kegiatan pelatihan dan kegiatan produksi yang ideal sebagaimana yang dicita-citakan. Secara ideal, kegiatan pelatihan yang dicita-citakan adalah sebuah lembaga pelatihan vokasional profesional yang mampu memberikan kegiatan pelatihan yang aktif dan berkesinambungan kepada semua narapidana dan anak didik aktif

Namun pada kenyataannya bengkel kerja yang ada di Lapas saat ini umumnya kurang dapat berperan sebagaimana yang diharapkan. Ini menunjukkan adanya banyak permasalahan/kendala yang dihadapi oleh Bengkel Kerja. Kondisi ini jelas menuntut adanya upaya pengembangan dan penguatan yang komprehensif dan berkesinambungan agar bengkel kerja pada setiap Lapas dapat menjadi Bengkel Kerja Produktif. Kenyataan yang ada pemberian keterampilan tersebut belum terlaksana secara optimal di mana salah satu penyebabnya adalah kurang memadainya kualitas sumber daya manusia petugas masyarakatan bidang latihan keterampilan yang tersedia di lembaga masyarakatan.

Istilah “Pemasyarakatan secara resmi menggantikan istilah Kepenjaraan sejak 27 April 1964, melalui amanat tertulis Presiden Republik Indonesia yang diberikan pada Konperensi Dinas para pejabat Kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang, Bandung dalam rangka mengadakan *retooling* dan *reshapimh* dari sistem Kepenjaraan, yang dianggap tidak selaras dengan adanya ide pengayoman sebagai konsepsi hukum nasional yang berkepribadian Pancasila. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Sejarah Pemasyarakatan, 2008: 32).

Sistem Pemasyarakatan bagi masyarakat umum lebih identik dengan “penjara” atau pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dalam kenyataannya, tugas pokok dan fungsi Sistem Pemasyarakatan juga mencakup pelayanan terhadap tahanan, perawatan terhadap barang sitaan dan barang rampasan negara, pengamanan, serta pembimbingan terhadap warga binaan masyarakatan dan klien masyarakatan. Hal ini juga tercermin dalam 10 (sepuluh) prinsip Pemasyarakatan yaitu :

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja
7. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
8. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila
9. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia
10. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.

Oleh karenanya, sub-sub sistem dari Sistem Pemasyarakatan (yang kemudian disebut Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan) tidak hanya Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan, namun juga Rumah Tahanan Negara untuk pelayanan tahanan (Rutan), Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) untuk perawatan barang-barang milik warga binaan atau yang menjadi barang bukti, serta Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk pembimbingan warga binaan dan klien pemasyarakatan.

Secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi Retributif (pembalasan), Deterrence (penjeraan), dan Resosialisasi. Dengan kata lain, pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi). Cetak Biru Pembaharuan Pemasyarakatan (2010: 6).

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu pelanggar hukum dengan sesama manusianya, antara pelanggar hukum dengan masyarakat serta alamnya, kesemuanya dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. (Bahrudin Soerjobroto, hal 13).

Dessy Debrilianwati (2013), menjelaskan bahwa untuk memberikan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan melalui berbagai kegiatan pelatihan keterampilan memerlukan suatu metode pembinaan yang meliputi; social work, psyhoanalytic approach, moral re-education dan religius approaches, medical approaches, counselling.

Upaya untuk menjabarkan fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan narapidana, dalam hal ini terkait latihan keterampilan dan kegiatan kerja, terus dilakukan. Hal ini tercermin dari beberapa kegiatan yang dikembangkan terkait latihan keterampilan dan kegiatan kerja narapidana, (sebagaimana yang tergambar pada table di atas), seperti mendorong kegiatan produksi di beberapa lapas, pameran hasil karya narapidana, dan

memantapkan kerjasama dengan instansi terkait dalam mengembangkan kegiatan kerja narapidana. Berbagai upaya tersebut sejalan dengan harapan masyarakat tentang lapas yang seharusnya mampu menjalankan perannya dalam melakukan perubahan kearah yang lebih baik terhadap narapidana.

Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, di mana dalam proses penelitian yang digunakan berdasarkan teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti untuk menemukan solusi dalam permasalahan tersebut.

Menurut Sugiono (2015: 9) penelitian kualitatif sangat cocok diterapkan antara lain untuk meneliti hal-hal sebagai berikut:

1. Bila masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang, atau bahkan masih gelap. Metode kualitatif sangat cocok diterapkan pada kondisi semacam ini karena peneliti akan langsung masuk ke lapangan sehingga masalah akan ditemukan dengan jelas.
2. Metode kualitatif sangat cocok untuk memahami makna dibalik yang tampak. Gejala social sering tidak bisa dipahami berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan orang.
3. Metode kualitatif sangat cocok untuk memahami interaksi sosial. Interaksi sosial yang kompleks hanya dapat diurai jika peneliti menggunakan metode kualitatif antara lain dengan cara observasi terlibat dan wawancara mendalam terhadap kelompok sosial yang diteliti.

Alasan memilih pendekatan kualitatif karena hal ini berkaitan dengan konsep judul dan permasalahan yang dikemukakan pada pendahuluan yang mengarah pada fakta akan implementasi program Kegiatan kerja di dalam Lapas. Salah satu alasan mengapa seseorang melakukan penelitian kualitatif adalah karena topik yang diteliti perlu dieksplorasi. Sementara metode ini dipilih oleh peneliti karena tujuan dari penelitian ini menganalisis implementasi kegiatan dan keterampilan kerja yang dilakukan di Lapas Tangerang. Kemudian menurut Sugiyono (2015: 2) Bahwa penelitian kualitatif dilakukan apabila kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, selama berada di obyek, dan setelah keluar dari obyek, kondisi obyek yang diteliti relatif tidak berubah. Dengan kata lain penelitian ini adalah penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan oleh obyek dalam kondisi yang alamiah atau apa adanya.

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian kualitatif ini sangat cocok dengan kondisi yang ada pada keadaan dan kondisi Lapas I Tangerang.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai Analisis Implementasi Program Keterampilan dan Kegiatan Kerja Bagi Narapidana Studi Kasus Lapas Kelas I Tangerang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program tersebut sudah berjalan dengan baik dan partisipasi narapidana dalam kegiatan kerja cukup maksimal. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program tersebut, seperti minimnya kemampuan riset pasar, terbatasnya ruang kerja, skill dan pengalaman kerja yang tidak terstandarisasi, fokus pengawasan pada kegiatan bukan bisnis, dan pemasaran yang masih konvensional.

Dessy Debrilianwati (2013), menjelaskan bahwa untuk memberikan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan melalui berbagai kegiatan pelatihan keterampilan memerlukan suatu metode pembinaan yang meliputi; *social work, psychoanalytic approach, moral re-education dan religius approaches, medical approaches, counselling.*

Penjelasan tersebut menguraikan tujuan dari pemasyarakatan yaitu menciptakan hubungan harmonis antara pelanggar hukum dengan masyarakat dan alam serta membantu proses pembinaan bagi narapidana. Kemudian, dibahas bahwa pembinaan narapidana melalui pelatihan keterampilan memerlukan berbagai. Dalam hal ini, Lapas Kelas I Tangerang melakukan berbagai kegiatan latihan keterampilan dan kegiatan kerja bagi narapidana, seperti mempromosikan produksi narapidana, menyelenggarakan pameran hasil karya, dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan kegiatan kerja. Hal ini bertujuan untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap Lapas sebagai lembaga pemasyarakatan yang dapat membantu perubahan positif bagi narapidana.

Latihan keterampilan dan kegiatan kerja narapidana merupakan bagian penting dari pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan narapidana keterampilan dan pengalaman kerja agar mereka dapat siap untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Kegiatan ini juga diharapkan dapat membantu narapidana untuk memiliki sumber penghasilan dan membangun kemandirian setelah bebas dari pemasyarakatan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pihak lapas melakukan beberapa tindakan, seperti mendorong kegiatan produksi di beberapa lapas. Ini merupakan upaya untuk memberikan narapidana kesempatan untuk belajar dan berlatih dalam menjalankan suatu pekerjaan produktif. Hal ini juga dapat membantu narapidana untuk memiliki sumber penghasilan dan membangun kemandirian mereka.

Selain itu, pihak lapas juga melakukan pameran hasil karya narapidana. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada narapidana atas hasil karya yang sudah mereka hasilkan dan memperlihatkan hasil latihan keterampilan yang telah mereka dapatkan. Hal ini dapat memotivasi narapidana untuk terus berusaha dan berkembang dalam hal keterampilan dan kegiatan kerja.

Terakhir, pihak lapas juga memantapkan kerjasama dengan instansi terkait dalam mengembangkan kegiatan kerja narapidana. Kegiatan dapat membantu untuk mengatasi beberapa kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kegiatan latihan keterampilan dan kerja narapidana. Kerjasama ini juga dapat membantu untuk memperluas jejaring dan mempermudah akses pasar bagi hasil karya narapidana.

Dengan demikian, latihan keterampilan dan kegiatan kerja narapidana merupakan bagian penting dari pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Kegiatan dapat membantu narapidana untuk memiliki keterampilan dan pengalaman kerja, memiliki sumber penghasilan dan membangun kemandirian, serta siap kembali ke masyarakat setelah bebas dari pemasyarakatan.

Evaluasi dan analisis terhadap kegiatan latihan keterampilan dan kegiatan kerja narapidana sangat penting dilakukan agar dapat memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan dan hasil yang diharapkan dari lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini, analisis dan evaluasi meliputi beberapa aspek seperti hasil produksi narapidana, tingkat partisipasi narapidana dalam kegiatan tersebut, tingkat keterampilan narapidana setelah mengikuti pelatihan, serta perkembangan keterampilan dan kegiatan kerja narapidana seiring berjalannya waktu.

Evaluasi dan analisis juga melibatkan aspek-aspek eksternal seperti tingkat penerimaan masyarakat terhadap hasil karya narapidana, tingkat minat dan kerja sama dari instansi terkait, dan tingkat peningkatan kapasitas dan keterampilan narapidana setelah mengikuti kegiatan.

Untuk memastikan bahwa kegiatan latihan keterampilan dan kegiatan kerja yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang berjalan dengan baik dan sesuai

dengan tujuan yang ditetapkan, perlu dilakukan analisis dan evaluasi secara berkala. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program tersebut dalam memberikan bimbingan dan pembinaan yang efektif bagi narapidana.

Dalam melakukan evaluasi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang mempertimbangkan beberapa aspek seperti tingkat partisipasi narapidana dalam kegiatan latihan keterampilan dan kerja, tingkat keterampilan dan pengalaman kerja yang didapatkan oleh narapidana, serta tingkat keberhasilan program tersebut dalam mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.

Hasil analisis dan evaluasi kegiatan tersebut dicatat dan dilaporkan secara berkala kepada pihak yang berwenang. Dari hasil analisis dan evaluasi ini, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang dapat mengambil tindakan perbaikan dan perubahan apabila diperlukan, guna memastikan bahwa kegiatan latihan keterampilan dan kerja narapidana dapat terus berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Hasil dari evaluasi dan analisis ini akan menjadi dasar bagi lembaga pemasyarakatan untuk melakukan perbaikan dan pengembangan kegiatan latihan keterampilan dan kegiatan kerja narapidana agar dapat mencapai tujuan dan harapan lembaga.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka sebagai kesimpulan adalah: a) Pelaksanaan/implementasi kegiatan latihan kerja di Lapas Kelas I Tangerang telah berjalan dengan cukup baik; b) Keterlibatan atau partisipasi narapidana dalam kegiatan kerja dapat dikatakan cukup maksimal

Adapun kendala pelaksanaan kegiatan keterampilan kerja adalah: a) Minimnya kemampuan untuk melakukan riset pasar terutama dalam menentukan produk yang akan dikembangkan; b) Terbatasnya ruang untuk melaksanakan kegiatan kerja akibat dampak overcrowded; c) Kegiatan produksi di Lapas bergantung kepada Kepala Lapas dan petugas bengkel kerja sehingga skill dan pengalaman kerja tidak terstandarisasi; d) Pengawasan produksi cenderung mempertimbangkan aspek kegiatan bukan aspek bisnis seperti perlunya *quality control produk*; dan e) Pemasaran yang ada masih konvensional terbatas pada wilayah sekitar Lapas.

Daftar Pustaka

Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian kualitatif*. Jakarta, Kencana.

Dessy Debrilianwati W, Choirul Saleh, Minto Hadi, (2013), *Peran dan Koordinasi Antar Instansi Dalam Pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan*.

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Sugiono. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta

J. Moleong. Lexy 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2010. Cetak Biru Pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2002. Bunga Rampai Pemasyarakatan. Kumpulan Tulisan Bahrudin Surjobroto. Jakarta.